

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Partai Politik

2.1.1.1 Pengertian Partai Politik

Sebelum mempelajari partai politik, esensial untuk mengerti definisi dari partai politik itu sendiri. Politik seringkali diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang terkait dengan usaha mencari, merencanakan, dan memelihara kekuasaan dalam sebuah kelompok untuk mencapai posisi puncak dalam hierarki kekuasaan. Dalam konteks sosial, ini melibatkan karakteristik, esensi, prinsip, proses, lingkup, dan konsekuensi dari kekuasaan. Karena itu, ilmu politik adalah bidang studi yang fokus pada perolehan dan pemeliharaan kekuasaan, eksekusi kekuasaan, pengaruh terhadap orang lain, serta perlawanan terhadap penerapan kekuasaan tersebut.

Partai politik memegang peranan penting dalam demokrasi. Negara dalam sistem demokrasi dioperasikan sesuai dengan keinginan rakyat, di mana mereka memiliki kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Institusi negara dijalankan oleh rakyat atau setidaknya mendapatkan persetujuan dari mereka. Kehadiran badan perwakilan yang terbentuk melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala merupakan syarat utama dari demokrasi yang sejati. Kebebasan politik juga esensial untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat menjadi sarana yang efektif dan mencerminkan kehendak rakyat.

Labolo, M., dan Ilham, T. (seperti dikutip oleh Budiarjo, 2014) mengemukakan tiga teori yang mencoba menjelaskan asal mula partai politik. Teori

pertama, kelembagaan, menyoroti hubungan antara parlemen awal dengan kemunculan partai politik, dimana partai-partai politik terbentuk dari anggota legislatif dan eksekutif yang mencari dukungan dan kontak dengan publik.

Teori kedua, situasi historis, memaparkan bahwa partai politik muncul sebagai tanggapan terhadap krisis dalam sistem politik yang bertransisi dari struktur tradisional yang kompleks, termasuk isu-isu legitimasi, integrasi, dan partisipasi dalam masyarakat yang dinamis.

Teori ketiga, pembangunan, memandang partai politik sebagai hasil dari modernisasi sosial ekonomi. Faktor-faktor seperti kemajuan dalam teknologi komunikasi, peningkatan akses pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, dan ekspansi kekuasaan negara, mendorong pembentukan organisasi politik yang mengintegrasikan berbagai kelompok kepentingan dan individu dengan orientasi, nilai, dan tujuan yang serupa.

Oleh karena itu, ketiga teori ini menawarkan perspektif yang beragam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada terbentuknya partai politik, dilihat dari sudut pandang historis, kelembagaan, dan modernisasi sosial ekonomi.

2.1.1.2 Tujuan Partai Politik

Organisasi partai politik memiliki tujuan utama untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki posisi politik secara legal, dengan niat untuk menerapkan kebijakan yang mereka advokasi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa "partai politik merupakan organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, yang memiliki kesamaan keinginan dan aspirasi untuk berjuang dan mempertahankan kepentingan

politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara." Selain itu, partai politik bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 1).

Partai politik adalah organisasi resmi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemilih dengan menguasai pemerintahan dan menempatkan anggotanya melalui Pemilihan Umum. Fungsi partai politik memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk pemilihan umum dan pengaruh dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Menurut Budiardjo (2014), partai politik didefinisikan sebagai "kelompok orang terorganisir yang memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang serupa." Tujuan utama mereka adalah memperoleh kekuasaan politik dan menduduki jabatan politik secara konstitusional untuk menerapkan program yang diusung.

Sedangkan menurut Giovanni Sartori dalam Budiardjo (2014) "partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik." Menurut Lapalombara dan Anderson Budiardjo (2014) "partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak beban." Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Partai politik adalah organisasi yang terorganisir dengan baik, yang terdiri dari individu-individu yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan politik yang spesifik.
2. Misi utama partai politik adalah untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan dalam arena politik. Kekuasaan ini dicapai melalui berbagai cara, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mengisi posisi dalam institusi pemerintahan.
3. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan mereka, partai politik sangat mengandalkan dukungan luas dari publik melalui pemilihan umum. Dukungan ini esensial untuk legitimasi dan kelangsungan dari agenda politik yang mereka promosikan.
4. Biasanya, partai politik juga memiliki serangkaian prinsip yang menjadi fondasi aktivitas mereka. Prinsip-prinsip ini termasuk nilai-nilai, orientasi politik, serta aspirasi dan tujuan kolektif yang dijunjung oleh anggota partai dalam rangka mencapai kesuksesan dalam persaingan politik dan dalam pengelolaan pemerintahan.

Partai politik, sebagai entitas terstruktur dalam lingkup politik nasional, memiliki beragam tujuan yang mencerminkan fungsi dan perannya dalam sistem politik. Tujuan primer dari pembentukan partai politik adalah untuk memenangkan, mempertahankan, atau mengendalikan kekuasaan dalam pemerintahan negara. Selain itu, tujuan-tujuan sekunder partai politik terlihat melalui aktivitas mereka, seperti yang diuraikan oleh Djuyandi (2017):

1. Mereka berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk usaha menempatkan anggota partai dalam jabatan pemerintahan. Dari posisi ini, partai politik dapat berperan aktif dalam pembuatan atau pengaruh terhadap keputusan politik dan kebijakan pemerintah.
2. Mereka melakukan pengawasan atas perilaku, tindakan, dan kebijakan otoritas berkuasa. Ketika partai politik tidak mendominasi pemerintahan, mereka berfungsi sebagai oposisi yang mengawasi pemerintah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.
3. Mereka mengintegrasikan berbagai tuntutan dan pandangan masyarakat, serta mengadvokasi isu-isu politik yang relevan dan diterima secara luas. Dengan demikian, partai politik bertindak sebagai mediator kepentingan, memainkan peran kunci dalam pembentukan agenda politik dan mengarahkan fokus publik pada isu-isu penting.

Oleh karena itu, tujuan-tujuan ini menunjukkan peran strategis partai politik dalam dinamika politik suatu negara, baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai oposisi, serta sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

2.1.1.3 Klasifikasi Partai Politik

Dalam ranah aktivitas politik, masyarakat sebagai subjek dalam sistem pemerintahan memiliki berbagai pilihan alternatif untuk menentukan afiliasi politik mereka. Pilihan tersebut seringkali dipengaruhi oleh ideologi atau aliran yang dipegang oleh partai politik tertentu. Di negara dengan struktur sosial yang paternalistik, keputusan masyarakat untuk bergabung

atau mendukung partai politik biasanya berdasarkan pada kesesuaian nilai dan program yang ditawarkan oleh partai itu.

Partai politik, sebagai institusi yang berfungsi merealisasikan aspirasi politik masyarakat, kerap menggunakan ideologi partai sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan massa. Dengan fokus pada program dan tujuan yang mereka bawa, partai politik berupaya menguatkan peran mereka dalam dinamika politik dan pemerintahan. Praktik ini merupakan karakteristik dari partai politik tradisional, di mana ideologi dan program dijadikan sebagai dasar utama untuk membangun dukungan massa dan mengarahkan politik nasional.

Pamungkas (2015) menyatakan bahwa klasifikasi partai politik merujuk pada ragam jenis dan bentuk yang ada dan berkembang dalam dinamika politik sebuah negara. Klasifikasi ini berguna untuk memahami karakteristik dan peran dari masing-masing tipe partai politik, yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi berlandaskan komposisi dan peran keanggotaan, yakni:
 - a. Partai Massa: Ini adalah partai politik yang kekuatannya terutama berdasar pada jumlah anggota yang besar. Partai ini biasanya terdiri dari pendukung dari berbagai latar belakang politik yang bersatu demi memajukan agenda yang cenderung umum dan tidak spesifik.
 - b. Partai Kader: Partai politik ini menekankan pada organisasi yang solid dan disiplin anggota yang ketat. Pemimpin partai memiliki tanggung jawab krusial dalam memastikan kesetiaan pada doktrin partai dengan seleksi anggota yang rigor.

2. Klasifikasi partai politik berdasarkan karakteristik dan orientasinya meliputi:
 - a. Partai Lindungan: Ini adalah jenis partai politik yang biasanya memiliki struktur organisasi nasional yang tidak terlalu ketat, namun mungkin lebih terstruktur di tingkat lokal. Partai ini cenderung kurang disiplin dan tidak konsisten dalam pemungutan iuran. Tujuan utamanya adalah untuk memenangkan pemilihan umum dan mencalonkan anggotanya, dengan aktivitas yang meningkat menjelang pemilihan. Contoh partai lindungan termasuk Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat.
 - b. Partai Ideologi: Partai politik ini memiliki ideologi yang jelas dan prinsip-prinsip yang dianut secara ketat oleh para pemimpinnya. Partai ini menuntut disiplin yang tinggi dari anggotanya. Di Indonesia, mayoritas partai politik termasuk dalam kategori partai ideologi, dengan keanggotaan dan program yang berakar pada nilai-nilai ideologis yang konsisten.

Dua kategori utama partai politik, yaitu partai massa dan partai pelindung, serta partai kader dan partai ideologi, menentukan strategi koalisi yang beragam. Koalisi lebih mudah terbentuk antara partai dengan orientasi yang sama, seperti partai massa atau partai pelindung. Partai massa bergantung pada jumlah anggota sebagai dukungan utama, sedangkan partai pelindung menggunakan struktur organisasi yang fleksibel untuk memenangkan pemilu. Koalisi antara partai kader atau partai ideologi sering kali lebih kompleks. Partai kader berfokus pada disiplin organisasi yang ketat dan kualitas anggota, sementara partai ideologi berlandaskan pada ideologi yang jelas. Koalisi antar partai dengan ideologi yang bertentangan, misalnya antara partai religius dengan partai sekuler, bisa sangat menantang karena

perbedaan prinsip dasar. Oleh karena itu, strategi koalisi harus memperhatikan kesesuaian orientasi dan nilai-nilai, serta kemampuan untuk menyepakati tujuan dan agenda politik bersama.

2.1.1.4 Sistem Kepartaian

Dalam konteks politik ketatanegaraan, ada tiga sistem kepartaian yang umum dikenal:

1. **Sistem Partai Tunggal:** Istilah ini mengacu pada dominasi atau eksklusivitas satu partai politik dalam sebuah negara. Seringkali, sistem ini diadopsi oleh negara-negara yang baru merdeka atau yang menghadapi tantangan integrasi sosial dan budaya yang kompleks. Pemimpin negara biasanya memilih sistem ini untuk memudahkan integrasi antar kelompok sosial, wilayah, etnis, dan pandangan hidup yang beragam, guna menghindari konflik sosial yang bisa mengganggu pembangunan dan menyebabkan disintegrasi.
2. **Sistem Dua Partai:** Sistem ini umum di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat dan Filipina. Di sini, partai politik terbagi menjadi partai berkuasa (pemenang pemilu) dan partai oposisi (yang kalah). Sistem ini memberikan alternatif yang jelas bagi pemilih dan kontrol yang kuat dalam pembentukan kebijakan.
3. **Sistem Banyak Partai:** Sistem ini sering terlihat di negara-negara dengan keragaman sosial, budaya, dan politik yang signifikan. Sistem ini memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat dan beragam pandangan politik. Negara dengan sistem ini

biasanya memiliki spektrum politik yang lebih luas dan kompleks, dengan partai-partai yang mewakili berbagai kepentingan dan ideologi yang berbeda.

Setiap sistem kepartaian berdampak pada dinamika politik dan stabilitas negara, serta mempengaruhi interaksi, kompetisi, dan kolaborasi antar partai politik dalam mengelola pemerintahan dan politik negara.

2.1.1.5 Tipologi Partai Politik

Dalam konteks politik, tipologi merujuk pada klasifikasi partai politik berdasarkan kriteria relevan seperti prinsip dan orientasi ideologi, struktur dan fungsi anggota, basis sosial, dan tujuan yang diadvokasi. Tipologi ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang memfasilitasi pemahaman dan analisis terhadap berbagai partai politik dalam sistem kepartaian. Tipologi menyediakan aturan atau panduan yang berguna ketika ada kompleksitas atau ambiguitas dalam memahami dinamika partai politik. Ini membantu dalam mengilustrasikan dan memahami perbedaan mendasar antara partai politik berdasarkan karakteristik dan sifat mereka. Misalnya, klasifikasi partai otoriter dan demokratis, partai integratif dan representatif, atau partai berbasis agama dan sekuler, masing-masing menyoroti perbedaan dalam pendekatan, nilai, dan tujuan politik yang diusung. Walaupun tipologi ini bersifat ideal dan mungkin tidak selalu mencakup semua kompleksitas di lapangan, tipologi masih memberikan kerangka yang berguna untuk analisis politik. Ini membantu analisis memahami dinamika kompetisi politik, strategi partai, serta dampak dari komposisi dan orientasi partai politik terhadap proses politik secara umum. Beberapa tipologi menurut kriteria-kriteria tersebut :

1. Tipologi partai politik berdasarkan prinsip dan orientasi adalah kerangka klasifikasi yang membagi partai politik menjadi tiga jenis utama: pragmatis, doktriner, dan kepentingan.
 - a. Partai Politik Pragmatis: Partai pragmatis tidak terikat pada doktrin atau ideologi tertentu secara kaku. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan program dan aktivitas mereka berdasarkan perubahan situasi, waktu, dan kepemimpinan. Meski demikian, mereka masih mempertahankan identitas ideologis yang tercermin dari program yang dikembangkan oleh pemimpin mereka. Organisasi partai ini cenderung lebih fleksibel dan fokus pada adaptasi dengan kebutuhan politik serta popularitas di masyarakat.
 - b. Partai Politik Doktriner: Di sisi lain, partai doktriner memiliki ideologi atau doktrin yang jelas dan terstruktur. Mereka menyampaikan serangkaian nilai politik yang terdefinisi dengan baik melalui program-program aktivitas yang spesifik. Partai doktriner menekankan pada disiplin dalam pelaksanaan program dan biasanya memiliki struktur partai yang hierarkis dan ketat. Meskipun ada pergantian kepemimpinan, prinsip dasar dan program utama partai tetap konsisten dengan ideologi yang dianut.
 - c. Partai Politik Kepentingan: Partai kepentingan dibentuk berdasarkan kepentingan spesifik yang diwakili. Partai ini sering kali muncul dalam sistem dua partai yang kompetitif, di mana mereka mewakili atau memperjuangkan kepentingan tertentu yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh partai lain. Mereka biasanya berfokus pada agenda

kepentingan tertentu dan memiliki struktur organisasi yang lebih fleksibel dibandingkan partai doktriner.

2. Berdasarkan struktur dan fungsi anggotanya, partai politik dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni:

a. Partai Massa adalah jenis partai politik yang mengandalkan jumlah anggota yang besar. Tujuan mereka adalah untuk memobilisasi sejumlah besar massa dan berfungsi sebagai pelindung bagi berbagai kelompok masyarakat. Mereka berfokus pada kemenangan dalam pemilihan umum dengan mendapatkan dukungan massa yang luas dan menjaga kesatuan nasional dengan memobilisasi masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan tujuan politik yang telah ditetapkan. Partai Massa biasanya terbentuk dari koalisi berbagai arus politik yang bersatu di bawah satu bendera untuk mencapai tujuan bersama.

b. Partai Kader, di sisi lain, mengutamakan kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan disiplin sebagai sumber kekuatan utama mereka. Seleksi anggota partai kader sangat selektif, melalui proses kaderisasi yang sistematis dan hierarkis. Struktur organisasi mereka sangat terorganisir dengan jelas, menunjukkan rantai komando dan tanggung jawab yang jelas. Partai Kader sering dianggap sebagai partai elit karena mereka hanya merekrut anggota yang memiliki kualitas dan komitmen tinggi terhadap ideologi dan agenda partai.

3. Berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan tujuan, partai politik dapat dikategorikan ke dalam empat tipe utama:

- a. Partai politik yang anggotanya melintasi berbagai strata sosial: Tipe partai ini terdiri dari anggota dari semua lapisan masyarakat, termasuk kelas atas, menengah, dan bawah. Mereka berusaha untuk mewakili kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di masyarakat, dengan tujuan mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai segmen masyarakat.
- b. Partai politik yang anggotanya dari kelompok tertentu: Partai ini mewakili kepentingan spesifik dari kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti petani, pekerja, atau pengusaha. Anggota partai ini berasal dari kelompok yang memiliki kesamaan dalam profesi atau kepentingan ekonomi, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan khusus dari kelompok mereka.
- c. Partai politik yang anggotanya adalah pemeluk agama tertentu: Tipe partai ini dibentuk oleh anggota yang memiliki kesamaan latar belakang keagamaan. Mereka mengidentifikasi diri berdasarkan agama tertentu dan berusaha memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan yang sesuai dengan pandangan agama mereka. Partai ini seringkali memiliki agenda politik yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, baik dalam aspek sosial maupun moral.
- d. Partai politik yang mewakili bangsa, bahasa, dan daerah tertentu: Partai ini mewakili kepentingan dari bangsa, bahasa, atau daerah tertentu dalam sebuah negara. Mereka berjuang untuk mendapatkan otonomi atau representasi yang lebih besar bagi kelompok etnis atau daerah tertentu, dengan tujuan untuk memajukan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya dari kelompok tersebut.

2.1.2 Rekrutmen Politik

Dalam konteks demokrasi, rekrutmen politik oleh partai politik adalah aspek penting yang membentuk karakter dan kualitas partai tersebut. Hopkins (dikutip oleh Pamungkas, 2015) menyatakan bahwa fungsi ini unik untuk partai politik, dimana proses rekrutmen tidak hanya untuk menarik anggota baru, tetapi juga untuk menominasikan individu ke posisi pemerintahan. Katz (dikutip oleh Pamungkas, 2015) menambahkan bahwa rekrutmen politik mencerminkan karakteristik partai, seperti tipologi partai (seperti partai massa, kader, catch-all, atau kartel). Proses rekrutmen politik yang melibatkan seleksi ketat ini penting untuk menentukan individu yang paling layak untuk posisi strategis dalam pemerintahan, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kesetiaan kepada partai. Hal ini vital untuk memastikan bahwa partai memiliki anggota yang dapat berpengaruh dan memimpin dalam arena politik, serta memenuhi harapan publik dalam sistem demokrasi (Surbakti, 2010: 118).

Proses rekrutmen politik untuk pemilihan umum terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama, sertifikasi, menetapkan kriteria untuk kelayakan calon, termasuk aturan pemilihan, kebijakan partai, dan norma sosial. Tahap kedua, penominasian, melibatkan seleksi calon yang memenuhi syarat berdasarkan ketersediaan dan permintaan dari penyeleksi. Tahap ketiga, pemilihan umum, adalah proses penentuan pemenang pemilu. Tahapan sertifikasi dan penominasian sepenuhnya berada dalam kendali partai politik, sedangkan tahap pemilihan umum merupakan domain dari pemilih, di mana mereka memilih pemimpin dari kandidat yang tersedia. (Djojosoekarto & Sandjaja, dalam Pamungkas, 2015: 92)

Pendaftaran partai politik adalah tahap pertama dan kedua dari proses rekrutmen politik. Setelah itu, pemilih melakukan tahap ketiga, di mana mereka memilih calon pemimpin.

Pencalonan adalah tahap penting dalam pemilu. "Pencalonan adalah tata cara yang ditempuh peserta pemilu dalam mengajukan calon, yang meliputi siapa yang melakukan pencalonan, bagaimana cara menentukan calon, bagaimana cara menyusun daftar calon, dan apa persyaratan seorang calon," menurut Surbakti (Surbakti, 2010). Ada tiga opsi untuk mencalonkan: oleh partai politik, perseorangan, atau keduanya.

Amandemen UUD 1945 mengatur prosedur rekrutmen yang dilakukan partai politik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 6 menetapkan bahwa partai politik bertanggung jawab mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Pasal 22E ayat (3) menegaskan peran partai politik sebagai peserta dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Proses ini melibatkan pencarian, pemilihan, dan pengusulan calon yang memenuhi kriteria hukum dan sosial sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Amandemen ini turut berpengaruh terhadap dinamika pembentukan dinasti politik di tingkat lokal maupun nasional.

Hazan dan Rahat dalam karya Pamungkas (2015) mengidentifikasi empat aspek krusial dalam rekrutmen politik oleh partai politik: "(1) identitas individu yang dapat dinominasikan sebagai kandidat; (2) pihak yang bertanggung jawab atas seleksi kandidat (selectorate); (3) lokasi di mana seleksi kandidat berlangsung; dan (4) proses pengambilan keputusan terhadap kandidat." Berdasarkan keempat aspek

tersebut, dapat dikembangkan model pengelolaan rekrutmen partai yang menentukan apakah prosesnya bersifat inklusif atau eksklusif, serta sentralistik atau desentralistik. Pertanyaan mengenai siapa yang akan dicalonkan menjadi kunci dalam model ini.

Hazan dan Rahat (dalam Pamungkas, 2015) memaparkan dua model sistem seleksi kandidat dalam konteks partai politik. Model pertama adalah inklusif (terbuka), di mana setiap orang dapat mengajukan diri sebagai kandidat melalui partai politik dengan memenuhi syarat yang tidak terlalu berat (*eligible*). Model ini melibatkan anggota partai secara lebih luas dalam proses seleksi, sehingga lebih banyak orang terlibat dalam penentuan calon. Model kedua, eksklusif (tertutup), merupakan kebalikan dari model pertama, dengan syarat yang lebih berat yang membatasi banyak orang untuk mengajukan diri. Seleksi dalam model ini biasanya ditentukan oleh individu tertentu, seperti ketua partai politik atau anggota elit dalam partai. Model ini bisa bersifat terpusat jika seleksi dilakukan oleh penyeleksi di tingkat nasional partai, atau terdesentralisasi jika dilakukan oleh cabang-cabang partai. Model seleksi eksklusif dan tertutup cenderung menunjukkan adanya kontrol yang lebih kuat dari elit partai politik atas proses pemilihan kandidat, sedangkan model inklusif dan terbuka lebih mendukung partisipasi yang lebih luas dari anggota partai dan masyarakat umum.

Proses tersebut dikategorikan sebagai informal ketika tidak terdapat standar norma yang formal, atau disebut formal jika prosedur yang standar dan eksplisit telah ditetapkan. Karakteristik inklusif, desentralisasi, dan formal merupakan indikator dari rekrutmen politik yang demokratis, sedangkan kebalikannya

menandakan proses yang tidak demokratis. Berbeda dengan pemilihan legislatif dan presiden yang hanya memperbolehkan pencalonan melalui partai politik, pemilihan kepala daerah menawarkan dua metode pencalonan: (1) usulan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang memegang kursi di DPRD dan mencapai ambang batas pencalonan (20% kursi DPRD atau 25% suara sah pada daerah pemilihan terkait), dan (2) jalur independen yang didukung oleh jumlah pemilih tertentu

Meskipun demikian, dominasi jalur partai politik dalam pencalonan, terutama di daerah dengan jumlah pemilih besar, jarang menemukan kandidat dari jalur ini. Kelangkaan kandidat independen diduga karena persyaratan pencalonan yang membutuhkan dukungan pemilih sebesar 6,5% hingga 10% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada terakhir, yang dianggap memberatkan. Dominasi partai politik dalam pencalonan menjadikan mereka sebagai institusi strategis yang menentukan calon penyelenggara negara. Tidak semua negara memberikan proses pencalonan melalui partai politik sebagai domain otonom partai, namun dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia, proses ini diberikan kepada mekanisme demokrasi internal partai.

Pengabaian peran publik dalam proses pencalonan oleh partai politik dapat membuka peluang bagi praktik-praktik pencalonan yang tidak demokratis. Hal ini diperkuat oleh temuan studi kasus di Parlemen Inggris oleh Pippa Norris dan Lovenduski, seperti yang dikutip oleh Pamungkas (2015), yang mengungkapkan bahwa proses rekrutmen politik oleh partai-partai politik seringkali diskriminatif.

Dalam proses seleksi, kriteria yang ditetapkan oleh tim seleksi dapat menjadi alat untuk melakukan diskriminasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kedekatan personal berdampak signifikan terhadap peluang seseorang untuk terpilih sebagai kandidat, terutama dalam lingkungan partai yang bersifat feodal dan oligarkis. Rekrutmen politik pada tahap akhir melibatkan proses pemungutan suara oleh pemilih, yang merupakan domain eksklusif bagi elektorat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, keterpilihan seringkali dikaitkan dengan kepemilikan modal, termasuk modal politik, sosial, dan ekonomi. Fadilah (2016) menyatakan bahwa ketiga bentuk modal ini dapat beroperasi secara independen tetapi seringkali saling terkait. Penguasaan modal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah adalah kunci, karena menjelaskan kecenderungan partai politik untuk mengusung kandidat dengan kemampuan finansial yang memadai untuk bersaing dalam arena politik (Fadilah, 2016: 90).

Pemilihan kepala daerah yang menerapkan sistem First Past The Post (FPTP) menetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara terbanyak di setiap wilayah pemilihan, dengan setiap kursi dimenangkan oleh kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Sistem ini memfasilitasi fenomena 'personal vote', di mana pemilih lebih memprioritaskan profil individu kandidat daripada partai politik yang mendukungnya saat memilih.

Dalam pilkada, kandidat dari dinasti politik sering memiliki keuntungan karena mereka telah dikenal secara pribadi oleh pemilih dan biasanya sudah populer berkat pengalaman sebelumnya sebagai pemimpin daerah atau tokoh masyarakat

yang terkenal. Sistem FPTP menguntungkan kandidat populer ini dengan memungkinkan mereka untuk memenangkan pemilihan walaupun tanpa dukungan penuh dari partai politik yang mengusung. Karena itu, partai politik sering mempertimbangkan untuk mendukung kandidat dinasti sebagai strategi untuk memenangkan pilkada. Strategi ini didasarkan pada pemahaman bahwa kandidat dinasti memiliki keunggulan kompetitif dalam popularitas dan pengakuan dari pemilih, yang merupakan aset penting dalam sistem pemilihan FPTP.

Penelitian tentang kepemimpinan daerah mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama masa jabatan dapat menciptakan basis popularitas yang kuat. Jurdi (2016) menyatakan bahwa basis popularitas ini seringkali dapat diturunkan dan menjadi kunci dalam persaingan politik. Untuk kandidat dari dinasti politik, nama keluarga atau status sebagai petahana berperan sebagai brand yang dikenal pemilih, memberi mereka keuntungan dalam memperoleh popularitas dan dukungan pemilih. Studi di Filipina juga menemukan bahwa kandidat dinasti sering menggunakan "efek petahana" untuk meningkatkan kesempatan mereka terpilih kembali (Asako et al., 2012; Querubin, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Rekrutmen politik adalah kebutuhan penting bagi partai politik untuk menemukan kandidat berpotensi yang selaras dengan visi dan misi mereka, serta untuk mengembangkan individu menjadi lebih baik. Rekrutmen ini harus berlangsung agar partai dapat memenuhi salah satu fungsi utamanya, karena tanpa rekrutmen, partai politik dianggap tidak beroperasi. Karena itu, penelitian tentang rekrutmen politik menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut guna

memahami mekanisme proses rekrutmen yang dijalankan. Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis telah mengkaji berbagai hasil penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Kaswan Try Poetra mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan (2013) dengan judul *“Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Manda”*. Studi ini melihat bagaimana PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat membandingkan cara mereka memilih caleg untuk DPRD pada pemilu 2014. Studi ini menemukan bahwa cara PDI-Perjuangan merekrut bacaleg terbagi menjadi dua jalur: jalur khusus, yang melibatkan kandidat dengan pendidikan tinggi dan pengaruh di masyarakat. Jalur umum melibatkan calon legislatif baru yang bukan anggota partai. Walau bagaimanapun, pola rekrutmen bacaleg Partai Demokrat mengutamakan yang berasal dari kader yang setia kepada partai untuk menghindari perselisihan internal. Pola ini juga mengutamakan yang berasal dari non-kader, yaitu mereka yang memiliki pengaruh atau dikenal di masyarakat. Proses rekrutmen bacaleg kedua partai ini sangat berbeda, tetapi tidak sama. Karena setiap partai memiliki kelebihan dan kekurangan, PDI-Perjuangan mencari caleg dari dalam partai ketimbang dari luar partai untuk mengurangi konflik internal dan bergantung pada caleg yang lebih berpengalaman karena telah menunjukkan kinerja yang baik dan dapat memobilisasi suara masyarakat. Ini pasti akan mengurangi regenerasi caleg karena memprioritaskan caleg dengan pengalaman lama, sementara Partai Demokrat mendapat manfaat dari

mengutamakan caleg muda, yang memiliki pemikiran yang inovatif, dan kader internal yang telah dididik yang telah bekerja sama untuk memperkuat partai. Namun, ini memberikan kekurangan bagi Partai Demokrat karena bergantung pada caleg muda untuk berdam-dammam. Bahkan saat biaya politik masih tinggi dan sulit dijangkau oleh kelompok ekonomi yang lebih lemah, hal ini terkesan membuat rekrutmen tertutup dan mengutamakan jalur khusus, yang menghilangkan peluang bagi masyarakat untuk menjadi caleg di pemilu 2014.

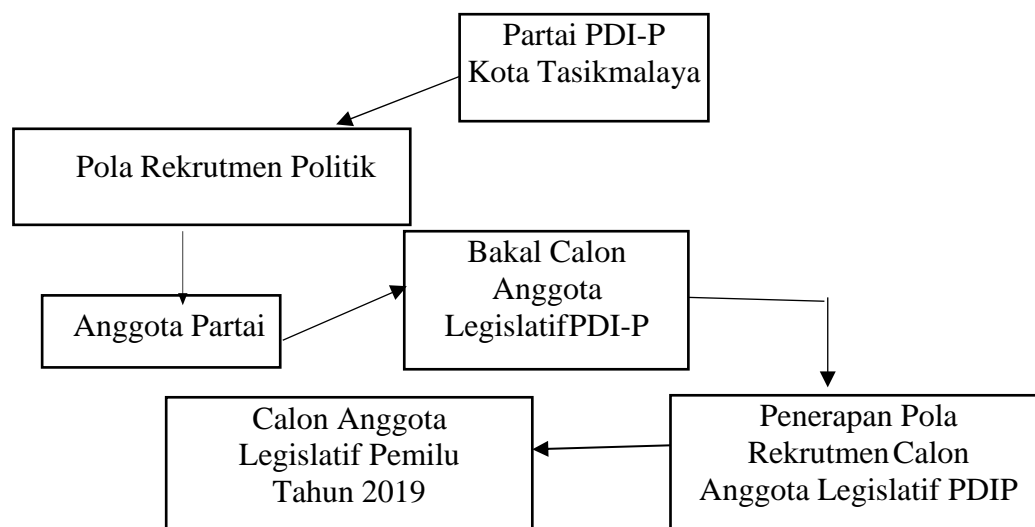
2. Noor Asty Baalwy mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan (2016) dengan judul "*Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar*". Studi ini menyelidiki cara Partai NasDem Kota Makassar melakukan rekrutmen politik pada Pemilu 2014. Partai NasDem tidak baru dalam pemilu 2014; itu sudah ada sebelumnya. Awalnya, Partai NasDem adalah ormas NasDem yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pada tahun 2011, NasDem menjadi partai politik secara resmi dan memiliki gagasan pemulihan Indonesia. Tetap saja, Partai NasDem membutuhkan anggota politik. Selain itu, sebagai partai politik baru, Partai NasDem berfokus pada rekrutmen anggota dengan tujuan kaderisasi anggota untuk mendapatkan suara di Pemilu 2014. Partai ini melakukan rekrutmen anggota dengan cara persuasif dengan melakukan sosialisasi partai di masyarakat Kota Makassar untuk menunjukkan eksistensi partai dalam menghadapi pemilu 2014. Jadi, ada dua sistem untuk rekrutmen politik. Yang pertama adalah sistem rekrutmen politik terbuka, yang menerima kader partai

tanpa mempertimbangkan status, kekayaan, jabatan, dll. Yang kedua adalah sistem rekrutmen tertutup, yang memilih orang untuk jabatan di pemerintah dan partai. Dengan demikian, calon yang mendaftar hanya berdasarkan anggota elit Partai NasDem, menunjukkan bahwa sistem rekrutmen politik Partai NasDem tidak efektif. Karena persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak diketahui secara umum, hanya kalangan elit politik yang mengetahuinya.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kaswan Try Poetra (2013) dengan judul “Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Manda”	Dalam isi penelitiannya lebih menjelaskan tentang perbandingan pola rekrutmen calon legislatif PDI- Perjuangan dengan Partai Demokrat	Persamaan penelitian yakni bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik	Perbedaan penelitian dengan Kaswan terletak pada lokasi penelitian, partai politik yang akan diteliti dan rekrutmen anggota partai politik yang akan ditelitinya.
2	Noor Asty Baalwy (2015) dengan judul “Recruitment Politik Nasional Demikrat dalam Proses Instutionalisasi Partai di Kota Makasar”	Dalam isi penelitiannya menjelaskan terhadap sistem recruitmen anggota partai dan calon legislatif	Persamaan penelitian yakni bagaimana sistem recruitmren politik terhadap anggota partai dan calon legislatif dalam menghadapi pemilu	Perbedaan Penelitian dengan Noor terletak pada lokasi penelitian, dan parpol yang diteliti.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Partai politik adalah entitas kunci dalam demokrasi modern, berperan sebagai penghubung utama aspirasi rakyat melalui pemilihan umum. Partai-partai ini memainkan peran vital dalam merekrut dan mengembangkan kader berkualitas dan integritas tinggi, yang menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsi partai, termasuk dalam memenangkan dan mempertahankan kekuasaan politik secara konstitusional.

Rekrutmen politik adalah fungsi krusial yang dijalankan oleh partai politik. Proses ini melibatkan bukan hanya perekrutan anggota baru, tetapi juga seleksi dan nominasi mereka untuk posisi-posisi politik, termasuk legislatif dan eksekutif. Setiap partai memiliki metode rekrutmen yang unik, mencerminkan identitas, nilai, dan strategi politiknya. Namun, bisa jadi ada kesamaan dalam metode rekrutmen antar partai, yang menunjukkan karakteristik dan prinsip yang mereka pegang.

Oleh karena itu, metode rekrutmen politik tidak hanya strategi organisasi,

tetapi juga refleksi dari identitas dan aspirasi partai politik. Informasi tentang metode rekrutmen partai dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana partai mengatur sumber daya manusianya dan memperkuat posisi dalam lanskap politik.